

# Konflik Etnis di Ambon dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis<sup>1</sup>

Syarif Ibrahim Alqadrie

(Universitas Tanjung Pura)

## Abstract

*The ethnic conflicts in Ambon and Sambas are the result of the same causal factors. The ambivalent and unfair treatment by the armed forces and the police, and the absence of law enforcement, were factors that led to the emergence of these conflicts. Numerous crimes and violent actions (by gangsters and *preman*) took place. The local people—the Dayak and Malay community of Sambas, and the Ambon communities (both Moslem and Christians, and also the Bugis, Buton and Macassar)—took harsh measures without regard for the law. They did so since they could no longer trust the law, the armed forces and the police.*

*Cultural differences, to some extent, influenced the conflict. However, these served only as a trigger. Non-cultural factors underlined the phenomena considered as cultural differences between the conflicting groups. The differences between the conflicts in Ambon and Sambas lay in economic disparity in the former, and inequality in job opportunities and ownership in the latter. In Ambon, economic disparity and competition for work were more dominant than in Sambas. In the latter, the gradual loss and replacement of work and ownership from the local people to the newcomers or outsiders were under way. In the last part of this article, the author proposes three steps for the solution to the conflicts in both places: the short, medium, and long term solutions.*

## Pendahuluan

Kerjasama, konflik dan akomodasi merupakan tiga kemungkinan atau konsekuensi yang tidak terhindarkan dalam setiap hubungan antarkelompok. Konsekuensi seperti itu, mungkin terjadi antarkelompok etnis yang memiliki tidak hanya ciri-ciri kelompok, identitas dan nilai-nilai budaya sendiri yang diterima oleh

dan dapat dibedakan dari kelompok lain, tetapi juga jaringan interaksi sendiri yang menghasilkan kesetiakawanan kelompok. Kelompok-kelompok etnis juga memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang sama dengan, atau berbeda dari kelompok lainnya, dan memiliki jaringan kerja, baik dengan sesama kelompok maupun dengan kelompok etnis lain yang memiliki kepentingan yang sama.

Karena itu, bagaimana bentuk hubungan antar etnis—apakah mengandung kerjasama, pertikaian atau penyesuaian kembali—sangat ditentukan oleh dua faktor dasar di atas, yaitu faktor budaya yang cenderung bergandengan

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan hasil penulisan ulang dan penyempurnaan dari naskah asli yang disajikan dalam Sesi tentang 'Kerusuhan Massal dan Konflik Antargolongan' dalam Seminar 'Memasuki Abad ke-21: Antropologi Indonesia Menghadapi Krisis Budaya Bangsa', Jubileum ke-30 jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA, 6-8 Mei 1999. Pusat Studi Jepang, Kampus Universitas Indonesia, Depok.

pula dengan faktor psikologis, dan faktor struktural yang menyangkut faktor ekonomi dan politik.

Faktor budaya sebagai penyebab konflik antara lain berkaitan dengan perbedaan-perbedaan budaya yang terdapat pada kelompok-kelompok etnis yang sedang mengadakan hubungan. Perbedaan itu sulit dijembatani atau diatasi. Perbedaan-perbedaan budaya antara satu kelompok dengan kelompok etnis lainnya terwujud atau dapat ditemukan antara lain dalam bentuk sistem nilai budaya (*cultural value system*) (Alqadrie 1987) dan orientasi nilai budaya (*cultural value orientation*) (Kluckhohn dan Strodtbeck 1961). Kedua unsur budaya di atas, yang menjelma secara konkrit dalam bentuk mentalitas dan perilaku, cenderung mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses atau program pembangunan dari kelompok yang bersangkutan, atau dari suatu bangsa (Koentjaraningrat 1985).

Perbedaan-perbedaan antarkelompok etnis masih bersifat potensial, belum nyata, dan masih abstrak. Mereka baru menjadi nyata bila sistem nilai budaya dan orientasi nilai budaya tersebut terjelma ke dalam sikap, mentalitas, perilaku dan perbuatan manusia atau masyarakat, sebagai warga dari kelompok etnis tempat mereka menjadi anggotanya.

Sikap, mentalitas, perilaku dan perbuatan dari, atau yang dilakukan oleh anggota atau masyarakat kelompok etnis tertentu (umumnya dilakukan pendatang) yang tidak sesuai dengan kebiasaan, tradisi dan adat istiadat dari kelompok etnis lainnya, khususnya kelompok etnis setempat, cenderung menimbulkan keresahan, ketidakpuasan, kekecewaan dan luka atau kepedihan. Hal ini potensial untuk menciptakan pertikaian dan kerusuhan etnis yang menelan korban harta benda dan nyawa. Hal pokok yang menimbulkan bentuk hubungan antar etnis yang tidak serasi atau

yang menimbulkan konflik adalah tidak dilaksanakannya prinsip budaya: 'Di mana bumi dipijak, di situ pula langit dijunjung.'

Untuk memahami dan sekaligus menemukan akar masalah dan solusi mendasar atas konflik tersebut, para peneliti pada umumnya menggunakan perspektif budaya dan mental psikologis (*mental psychological and mental cultural perspective*), serta pendekatan sosial budaya (*social-cultural approach*) (Alqadrie 1999a).

Dari segi lain, faktor struktural, yang biasanya berkaitan dengan faktor ekonomi dan politik dan mengambil bentuk dalam kompetisi sosial ekonomi dan politik yang tidak adil, maupun dominasi kelompok etnis pendatang terhadap penduduk setempat atas sumber-sumber ekonomi, cenderung menyebabkan lahirnya ketidakpuasan yang akhirnya menimbulkan konflik etnis. Faktor struktural yang sensitif bagi meledaknya konflik etnis adalah keterlibatan aparat pemerintah yang berkolusi dengan konglomerat dan anggota-anggota kelompok etnis pendatang. Mereka meminggirkan atau memarginalisasi para anggota kelompok etnis setempat melalui dominasi dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam (SDA).

Hal ini diperjelas oleh Cynthia Enloe (dalam Pauker dkk. 1980:142) bahwa jenis konflik etnis yang sangat umum adalah konflik yang melibatkan kompetisi dalam memperoleh ganjaran ekonomi dan pembangunan sosial. Selain itu, sejak suatu kelompok etnis yang dominan secara politik dapat menguasai dan mendominasi—melalui mekanisme pemerintah pusat—pembagian keuntungan ekonomi, kompetisi ekonomi di antara kelompok etnis akan mungkin menjadi konflik politik.

Untuk mengurangi timbulnya konflik etnis yang berakar pada faktor struktural tersebut di atas, perlu adanya perbaikan yang menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah yang tidak adil

dan tidak peka terhadap kepentingan daerah dan penduduk setempat.

Tulisan ini ingin mengungkapkan akar masalah konflik etnis yang terjadi pada dua daerah di Indonesia: Ambon, Maluku, dan Sambas, Kalimantan Barat, dan sekaligus mencari solusi pemecahannya.

### Beberapa pengertian tentang kelompok etnis dan etnisitas

Istilah kelompok etnis (Naral 1964) pada umumnya dipahami sebagai sejumlah orang atau penduduk yang mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan;
- mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya;
- membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri;
- menentukan ciri kelompoknya yang diterima oleh dan dapat dibedakan dari kelompok lain.

Fredrik Barth (1988:11-12) kurang menyetujui definisi di atas, karena batasan ini tidak memungkinkan fenomena dan posisi kelompok etnis dalam kehidupan masyarakat dan budaya dapat teramati secara menyeluruh. Namun, definisi ideal semacam ini tidak berbeda jauh dengan kelompok etnis yang umumnya dikenal. Dalam hal ini, Barth merumuskan kelompok etnis yang umumnya dikenal sebagai suku bangsa sebagai kelompok budaya dan bahasa; sedangkan masyarakat adalah suatu unit yang hidup terpisah dari unit lain.

Ada hal pokok yang dapat ditemukan dalam kelompok etnis sebagai entitas yang dapat diidentikkan dengan suku bangsa. Suatu kelompok etnis memiliki ciri dan kebersamaan secara intern dan perbedaan secara ekstern dengan kelompok lain, tidak saja karena ia memiliki nilai-nilai budaya, tetapi juga bahasa

yang khas yang menjadi identitas kelompoknya.

Kata etnisitas berasal dari bahasa Yunani, *ethnos*, yang diidentikkan oleh Milton Gordon (1964) dengan istilah yang berkaitan dengan kerakyatan, atau masalah yang berkaitan dengan rakyat/penduduk (*peoplehood*). *Ethnos*, sesuai dengan kata awalnya, berarti rakyat (*people*) atau bangsa (*nation*) yang menunjukkan suatu kelompok dengan suatu perasaan keetnisan atau etnisitas bersama sebagai kelompok etnis (*ethnic groups*).

Dengan demikian, istilah etnisitas mengandung unsur perasaan bersama atau senasib sepenanggungan dalam suatu kelompok etnis. Dalam pengertian umum, istilah etnisitas juga menunjukkan keseluruhan aspek tentang masalah-masalah etnis (Akil 1994:184).

Walaupun semasa Karl Marx berkiprah sebagai intelektual dan peneliti, istilah kelompok etnis dan etnisitas telah dikenal, ia tidak memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap istilah itu (Zeitlin 1970). Luputnya perhatian akademis Marx terhadap dua istilah di atas disebabkan bukan karena ia kurang minat terhadap studi di bidang keetnisan, melainkan tampaknya ia sengaja menghindarkan diri dari analisis terhadap dinamika etnisitas yang melahirkan kesadaran etnis dan nasionalisme.

Hal ini disebabkan Marx dan Lenin bersikap mendua dan merasa curiga terhadap keberadaan etnisitas nasionalisme, menganggap sentimen etnis bersifat sementara untuk sekedar menampung keinginan kelompok orang-orang yang ingin mengusir imperialisme. Sentimen etnis akan mengancam gerakan sosialisme internasional serta membatasi kemampuan mengubah realitas (Zeitlin 1970; Enloe 1973:40-42).

Ramalan Marxisme pada akhirnya rontok setelah Uni Sovyet hancur menjadi negara-negara kecil dan Rusia juga terpuruk dalam

kesulitan ekonomi yang akut. Sebaliknya, Amerika Serikat (AS), lambang kapitalisme dan liberalisme, menurut pengamatan Alqadrie (1999c:4) berdiri tegak dan tegar menjadi satu-satunya negara adidaya dan polisi dunia yang 'mengatur' dunia melalui imperialisme bentuk baru. Hal ini dilegitimasi oleh Teori Sistem Fungsional.

Dari sudut lain, tetapi dengan pandangan rendah yang sama, Fungsionalisme, melalui pencetus utamanya, Talcott Parsons (1975:56-71; lihat pula kritik Hecter [1975] terhadap Teori Fungsional mengenai etnisitas) memandang etnisitas dengan sebelah mata dan menganggap etnisitas tidak lebih dari suatu rangkaian nilai-nilai dan warisan nilai budaya yang hanya dipertukan selama sosialisasi. Dengan demikian, menurut aliran sosiologi ini, etnisitas tidak dianggap sebagai elemen atau unsur aktif dan dinamis, tetapi sebaliknya, lebih sebagai elemen yang relatif pasif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kekeliruan dalam memandang peranan etnisitas dalam kehidupan sosial seperti pada Marxisme dan Fungsionalisme menghasilkan suatu kebijakan represif terhadap setiap ungkapan yang mengandung unsur kemanusiaan dan keadilan dari kelompok etnis yang terpinggirkan selama lebih dari tiga dekade Pemerintahan Orde Baru. Segala ungkapan demi perbaikan bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selalu dikaitkan dengan masalah SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) yang akan dihadapkan pada tuntutan 'subversi' atau 'terlibat' dalam organisasi 'terlarang'.

Pandangan sebelah mata seperti ini, baik dari Marxisme maupun dari Fungsionalisme, terhadap dinamika etnisitas di daerah luar Jawa, khususnya dalam kaitan dengan hubungan sosial-ekonomi antara penduduk setempat dengan penduduk pendatang, membuat

Pemerintah Pusat dan Pemda Tingkat I di berbagai propinsi di Indonesia merasa tidak perlu membuat kebijakan dari bawah ke atas (*bottom-up policies*). Hal itu berlaku pada daerah-daerah penyumbang devisa cukup besar dan penerima transmigran dan pendatang lainnya dengan jumlah cukup besar.

### **Kelompok etnis, etnisitas dan kesadaran etnis di Ambon dan Sambas**

Dilihat dari proses sejarah dan struktur masalahnya, tragedi Sambas dan Ambon mengandung perbedaan. Tetapi, dari akar masalahnya—sebagaimana disinyalir oleh Usman Pelly dalam *Republika* 27 April 1999:6<sup>2</sup>—masalah pertikaian antar etnis pada dua daerah tersebut memiliki persamaan. Keduanya dibungkus rapi dan dipicu oleh faktor etnisitas, yaitu perasaan bersama dan senasib sepenanggungan dalam suatu kelompok etnis yang melahirkan kesadaran etnis (*ethnic consciousness*) dan kesetiakawanan etnis (*ethnically based solidarity*). Padahal, kesadaran dan kesetiakawanan etnis itu merupakan reaksi spontan terhadap kondisi keterpurukan dan keterpinggiran, atau kemarginalan para anggota kelompok etnis setempat: Ambon dan Melayu di Kabupaten Sambas. Hal itu terjadi tidak saja melalui dominasi dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang membuat mereka menjadi penonton, tetapi juga melalui pengusuran, pemerasan dan pengambilalihan kepemilikan dan alat-alat produksi dengan cara-cara intimidasi oleh sekumpulan anggota kelompok etnis pendatang, atau kelompok kepentingan lainnya (Alqadrie 1999b).

<sup>2</sup> Untuk memahami kerusuhan atau konflik etnis di mana pun berada, peneliti perlu melihatnya tidak hanya dari struktur dan akar permasalahannya saja, tetapi juga dari faktor sejarah.

Kesadaran dan kesetiakawanan etnis yang timbul di kalangan masyarakat Maluku pada umumnya, orang Ambon pada khususnya, dan kelompok etnis Melayu di Sambas, tidak hanya timbul karena adanya mereka sebagai kelompok etnis yang secara biologis mampu berkembang dan bertahan serta memiliki identitas yang mempersatukan mereka dan membedakannya dengan kelompok etnis lain. Kesadaran etnis, sebagaimana dipahami oleh beberapa pengamat sosial non Fungsionalisme (Smith 1981; Hecter 1985), juga lebih banyak ditimbulkan oleh keberadaan mereka dalam hubungan dengan kelompok etnis lain, yang membawa pada kesadaran kolektif: mengapa mereka yang memiliki lingkungan alam yang subur dan sumber daya alam yang kaya tetap terpuruk dibandingkan dengan pendatang dan kelompok kepentingan lainnya. Kesadaran etnis secara kolektif seperti ini lebih merupakan reaksi terhadap himpitan dari luar, dan bukan merupakan pencerminan eksklusivitas kedaerahan dan keetnis sempit.

Apa yang terjadi di Ambon dan Sambas memperkuat sinyalemen di atas dan sekaligus menolak pandangan dari penganut Teori Difusi dan Inovasi (Rogers 1962; Deutsch 1966) dan Teori Modernisasi (Inkeless 1964). Teori-teori itu berkenaan dengan pembangunan nasional yang menilai bahwa identitas etnis, budaya yang berbeda dan eksklusif pada akhirnya akan menurun peranannya ketika industrialisasi dan modernisasi berjalan dengan sukses. Perbedaan-perbedaan budaya dan ekonomi, menurut teori di atas, pada akhirnya menghilang. Mobilisasi sosial akan menjurus ke arah asimilasi sejak industrialisasi mempersempit kesenjangan ekonomi dan budaya antara kelompok masyarakat inti (*core society*) dan kelompok etnis pendatang, dengan masyarakat pinggiran (*peripheral society*) atau penduduk setempat. Ini berarti bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi dan

industrialisasi tidak saja akan meningkatkan pencapaian ekonomi dan pembagian kerja fungsional, tetapi juga akan menghilangkan perbedaan-perbedaan budaya yang ditimbulkan oleh perbedaan etnisitas dan primordialisme.

Teori dan model pembangunan tersebut di atas melegitimasi dan menjiwai model pembangunan nasional selama 32 tahun Pemerintahan Orde Baru yang dilaksanakan secara tidak konsekuen dan didukung oleh pendekatan keamanan yang sempit (*narrow security approach*), serta kebijakan yang sentralistik (Suparlan dkk. 1999:4-5). Hal itu lebih menghasilkan banyak konglomerat karbitan, namun menelantarkan kepentingan rakyat kecil dan kelompok etnis setempat yang terpinggirkan di daerah-daerah luar Jawa (Alqadrie 1992a, 1992b:53-54). Dengan model dan kebijakan pembangunan seperti itulah, daerah-daerah luar Pulau Jawa, khususnya Maluku dan Kalimantan Barat, melaksanakan pembangunan mereka.

Sebelum masa penjajahan Belanda dan Portugis, Maluku terkenal dengan berbagai jenis rempah-rempah dan hasil lautnya sementara Kalimantan Barat dengan emas, kelapa, karet dan hasil hutannya. Sejak lama pula kedua daerah ini dan penduduk setempatnya menjadi daya tarik (*pulling factors*) berupa lapangan kerja, sumber daya alam dan karakter masyarakat yang akomodatif dan terbuka bagi pendatang dari luar. Jadilah kedua daerah itu tempat tujuan pendatang yang sangat disenangi dalam bentuk transmigrasi yang dibiayai oleh negara (*state-sponsored transmigration*), maupun transmigrasi swakarsa (*spontaneous transmigration*).

Walaupun transmigrasi resmi telah dilakukan sejak awal kemerdekaan yang terdiri dari kelompok etnis Jawa, Sunda dan Bali, transmigrasi swakarsa tampaknya lebih dominan di Maluku dan Kalimantan Barat sejak

sekitar 80 tahun yang lalu. Transmigran swaskarsa yang sangat menyukai Maluku, khususnya Ambon, untuk tempat bermukim mereka adalah kelompok etnis Bugis, Buton, Makasar (BBM). Kelompok etnis Madura menempatkan Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sambas, sebagai prioritas utama tempat pemukiman mereka. Dalam waktu tidak terlalu lama, mereka menjadi dominan dalam jumlah dan kedudukan strategis. Di Ambon, kelompok etnis BBM telah menjadi kelompok mayoritas dari segi jumlah dan posisi dalam bidang sosial, ekonomi dan politik (Suparlan dkk. 1999:8), sedangkan di Sambas, kelompok etnis Madura berjumlah sekitar 90.000 orang atau 10% dari seluruh penduduk kabupaten itu yang berjumlah sekitar 900.000 orang (Kapolres Sambas 1999).

Perbedaan antara kelompok etnis BBM dan Madura yang masing-masing bertransmigrasi ke Ambon dan ke Sambas adalah pada orientasi mata pencahariannya. Sebagian terbesar kelompok etnis BBM berorientasi kota. Mereka berdomisili dan bekerja di kota-kota besar, khususnya kota Ambon, sebagai pedagang atau pengusaha, di sektor jasa, pegawai negeri atau swasta, dan sebagainya. Di pihak lain, kelompok etnis Madura di Sambas berorientasi ke desa, berdomisili dan bekerja di daerah pedesaan antara lain sebagai petani, peternak, pedagang.

Karena kelompok etnis BBM di Ambon lebih berorientasi ke kota dibandingkan dengan kelompok etnis Madura di Sambas, maka kelompok etnis tersebut pertama lebih dapat memanfaatkan, dan diuntungkan oleh kebijakan pembangunan Pemerintahan Orde Baru selama lebih dari tiga dekade, dibandingkan dengan kelompok etnis Madura yang lebih berorientasi ke daerah pedesaan dan pertanian.

Karena itu, kesenjangan sosial ekonomi antara kelompok etnis BBM dengan penduduk

setempat—kelompok etnis Ambon—tampaknya lebih merupakan faktor utama yang menyebabkan kurang serasinya hubungan etnis antara mereka dibandingkan faktor lain, yaitu perbedaan budaya dan sistem nilai budaya. Di lain pihak, faktor kesenjangan ekonomi bukan merupakan penyebab utama timbulnya konflik antara pendatang Madura dengan Melayu di Kabupaten Sambas. Faktor utama penyebab konflik antara kedua kelompok etnis tersebut di Sambas lebih terletak pada kesempatan kerja dan hak kepemilikan yang secara perlahan-lahan dan pasti berpindah tangan dari anggota kelompok etnis Melayu ke pendatang Madura, melalui kekerasan atau intimidasi. Faktor ini tidak terdapat pada kasus Ambon.

Dominasi anggota kelompok etnis BBM dalam hampir semua sektor dan bidang pekerjaan lebih disebabkan oleh bekerjanya jaringan etnis, politik keetnisan dan politik uang, bukan oleh kekerasan dan intimidasi terang-terangan sebagaimana yang terjadi dalam kasus Sambas. Persamaan dengan kasus Sambas adalah adanya faktor premanisme dan bentuk kriminalitas lainnya yang telah bertahun-tahun merugikan dan meresahkan anggota kelompok etnis Ambon di Ambon dan kelompok etnis Melayu, Tionghoa dan anggota kelompok etnis lainnya.

Faktor lain sebagai pemicu konflik yang juga dimiliki oleh Ambon dan Sambas adalah ketidakmampuan petugas keamanan menangani dan mengantisipasi gelombang kerusuhan berikutnya secara profesional, menjaga netralitas dan komitmen pada tugas. Faktor lainnya yang menjadi pemicu kerusuhan di Sambas, namun tidak dapat ditemukan pada kerusuhan Ambon, adalah eksklusivisme dan arogansi budaya.

Beberapa faktor yang dikemukakan di atas tidak saja telah merugikan penduduk setempat dalam bentuk material dan nyawa, tetapi juga

dalam bentuk perasaan bahwa selama bertahun-tahun mereka telah dipermalukan, direndahkan dan martabatnya diinjak-injak tanpa ada usaha dari aparat pemerintahan dan keamanan untuk membuat mereka aman. Kepahitan dan keterpinggiran yang selama bertahun-tahun dirasakan oleh penduduk setempat telah menciptakan kesadaran etnis dan kesetia-kawanan etnis yang bukan lahir dari dorongan unsur primordialisme dan keetnisan sempit, melainkan faktor objektif berupa ketidakadilan. Kesadaran etnis ini secara tak terhindarkan mencuat ke atas permukaan dalam bentuk reaksi kolektif yang berlebihan. Karena itu, konflik etnis di Ambon dan Sambat merupakan akumulasi dari kekecewaan, keputusan dan kesabaran yang telah berada pada titik nadir.

### **Konflik dan tragedi di Ambon serta solusi pemecahannya**

#### **Konflik dan tragedi di Ambon**

Sejarah Ambon mencatat bahwa kehadiran kolonialisme Belanda dan Portugis di Maluku, serta perubahan posisi mereka dari pedagang yang ingin membeli rempah-rempah menjadi pemonopoli dan penguasa (tidak saja rempah-rempah tetapi juga seluruh komoditi yang ada di Maluku), telah merusak tatanan masyarakat yang sudah ada. Untuk memperlancar proses penguasaan itu, kedua dedengkot kolonialisme itu tidak saja menggunakan kekuatan senjata dan politik adu domba, tetapi juga memasukkan nilai-nilai budaya, termasuk ajaran agama.

Sejak itu, masyarakat Maluku (khususnya Ambon) terbagi menjadi dua komunitas beragama Islam dan Kristen, walaupun dalam satu kelompok etnis yang sama. Kedua komunitas itu terus bersaing dan bertarung bagi eksistensi masing-masing sejak hampir tiga abad yang lalu. Komunitas Islam, seperti dikemukakan oleh Usman Pelly (*Republika* 1999:6) merupakan pihak yang bertahan dari dan

berupaya agar tidak tergusur oleh komunitas Kristen yang didukung oleh ekspansi Portugis-Belanda. Dalam waktu yang hampir bersamaan, pertarungan antara dua komunitas itu terjadi juga di Filipina, yang mengakibatkan tergusurnya komunitas Islam ke Selatan, karena kebijakan kolonialisme Spanyol berpihak pada komunitas Katolik.

Sejarah pertarungan itu seakan-akan berulang kembali antara komunitas Ambon yang Kristen dengan yang Islam dan anggota kelompok etnis BBM yang hampir seluruhnya beragama Islam. Padahal, pertarungan itu lebih merupakan kelanjutan dari monopoli rempah-rempah, khususnya cengkeh, yang sebelumnya berada di tangan kolonialisme Belanda dan kemudian berganti ke tangan Pemerintah Orde Baru sejak tahun 1970. Alasan yang dikemukakan pemerintah Orde Baru adalah untuk memenuhi kebutuhan permintaan akan cengkeh bagi industri rokok di Jawa. Monopoli semacam ini, berdasarkan pengamatan M. Yusuf Kalla yang dikutip oleh Usman Pelly (*Republika* 1999:6), telah menimbulkan kemiskinan bagi petani Maluku. Karena sebagian besar petani Maluku beragama Kristen, maka keresahan dan oposisi, yang seharusnya diarahkan pada Pemerintahan Orde Baru dan Pemda Maluku sebagai penyambung tangan Pemerintah Pusat, seakan lebih mendapat legitimasi untuk ditujukan pada anggota komunitas Maluku yang beragama Islam. Mereka merupakan pelaku bisnis papan bawah dan menengah yang kebetulan bekerjasama dengan kelompok etnis BBM dan orang-orang Ambon keturunan Arab.

Kondisi di Kota Ambon menjadi lebih mencekam, dan kerusuhan etnis memang menjadi lebih kompleks. Konflik Ambon, yang merupakan ledakan dari kompetisi antar kelompok kepentingan serta dilestarikan dan dikendalikan oleh Pemerintah Orde Baru dan sisa-sisanya agar ia tidak sampai timbul di

permukaan dan dapat terus dinikmati oleh mereka, telah dibungkus dengan sangat rapi oleh sentimen agama. Hal itu dilakukan agar konflik itu memiliki daya pembeda, dengan mudah dapat menggerakkan massa dan dilestarikan.

Berdasarkan sistem nilai budayanya, sebenarnya tragedi Ambon dapat dihindari dan tidak perlu terjadi, walaupun masyarakat Maluku, khususnya Ambon, dalam menata kehidupan mereka selama berabad-abad telah hidup dalam tradisi kemajemukan (Suparlan dkk. 1999:10; Lokollo 1997; Pattikayhattu 1997).

Sebagaimana telah disebutkan pada awal tulisan ini, kerjasama, konflik dan akomodasi merupakan tiga kemungkinan yang tidak terhindarkan dalam setiap hubungan sosial atau kelompok. Demikian pula halnya dalam masyarakat Maluku, karena ketiga kemungkinan di atas justru merupakan bagian dari tradisi mereka. Namun, sejauh ini kemungkinan ketiga dari hubungan sosial, konflik, dapat dihindari, karena mereka menerima perbedaan itu apa adanya (dan tidak memaksakan persamaan), serta menekankan pentingnya persatuan, antara lain berdasarkan hubungan kekerabatan atau persaudaraan. Sistem kekerabatan ini meliputi hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah nyata yang diikat berdasarkan hubungan geneologi, maupun hubungan persaudaraan berdasarkan hubungan darah fiktif, yang terwujud melalui upacara adat pengangkatan anak atau saudara yang biasa disebut *pela*.

Berdasarkan tradisi dan budaya Maluku, konsekuensi yang mungkin timbul dalam setiap hubungan sosial adalah kerjasama dan akomodasi, dan bukan pertikaian. Dalam masyarakat Maluku, perbedaan seharusnya dapat dijumpai melalui penggunaan idiom *pela gandong* yaitu saudara berdasarkan ikatan sedarah atau saudara kandung, dan bentuk *pela* lainnya, sehingga timbul kesan ada ikatan

persatuan yang kuat yang biasa disebut 'orang kita'.

Beberapa hasil penelitian mengenai budaya dan tradisi Maluku dalam kaitan dengan konflik (Suparlan dkk. 1999; Lokollo 1997), menyebutkan bahwa secara tradisional sebuah masyarakat desa pada umumnya mempunyai hubungan *pela* dengan sebuah masyarakat desa lainnya. Mantap atau amannya kehidupan suatu masyarakat desa dari konflik dan serangan dari masyarakat desa-desa lainnya yang tidak menjadi pasangan *pelanya*, tergantung pada banyaknya masyarakat desa tersebut memiliki hubungan *pela* dengan masyarakat desa lainnya. Hal itu berarti bahwa masyarakat desa yang saling mempunyai hubungan *pela* tidak akan saling menyerang. Sebaliknya, mereka akan saling tolong menolong dan melindungi satu dengan lainnya dalam keadaan sulit atau diserang desa lainnya (Suparlan dkk. 1999:10).

Kalau bukan faktor budaya dan tradisi, faktor apakah yang menimbulkan konflik berdarah antara kelompok etnis BBM dengan komunitas Kristen Ambon? Sebelum mengungkapkan akar masalah tragedi Ambon dari faktor non-budaya, sebaiknya kita melihat terlebih dahulu pola hubungan antara ketiga komunitas yang secara langsung terlibat dalam konflik, yaitu anggota kelompok etnis BBM, komunitas Ambon yang beragama Islam dan yang beragama Kristen.

Ada hubungan sosial segi tiga antara ketiga komunitas itu, yaitu komunitas Ambon yang beragama Islam, yang beragama Kristen dan kelompok etnis BBM. Dalam hubungan segi tiga tersebut, ada pula batas-batas sosial di antara mereka. Ada batas yang dapat dijumpai, dan ada pula yang tidak. Antara kelompok etnis BBM dengan komunitas Ambon yang beragama Kristen, ada batas-batas sosial yang tidak dapat dijumpai. Begitu lebarnya batas sosial ini untuk

diseberangi sehingga apa pun yang 'berbau' BBM, walaupun kebanyakan komunitas Buton telah beberapa generasi hidup di pedesaan, tetap diperlakukan sebagai lawan. Sebaliknya, antara BBM dengan komunitas Ambon Islam, batas-batas sosial itu kelihatan ada, tetapi terbatas dalam batas etnisitas. Batas-batas sosial di antara keduanya masih dapat dijembatani.

Sebaliknya, sebelum terjadinya konflik, hampir tidak ada batas-batas sosial antara dua komunitas dari kelompok etnis Ambon: Islam dan Kristen. Setelah konflik terjadi, apalagi setelah pembakaran dan pengrusakan tempat-tempat ibadah dari kedua belah pihak, ditambah dengan isu yang terpolakan, yang menyatakan bahwa konflik di Ambon adalah konflik agama, maka batas-batas sosial itu mulai muncul dalam bentuk kecurigaan, sakit hati dan ketidakpedulian. Batas-batas sosial di antara mereka mulai sulit terseberangi. Dalam hal ini, berhubung komunitas Ambon yang beragama Katolik merupakan kelompok minoritas, mereka bersifat netral dan tidak berpihak pada salah satu komunitas.

Afiliasi atau pengelompokan baru di atas telah melahirkan kesetiakawanan sosial yang tercipta tidak saja atas dasar religiusitas, tetapi juga atas dasar kepentingan ekonomi atau bisnis. Ketika kepentingan ini dapat dipersatukan dan memberikan keuntungan bersama, dan kepentingan bersama itu dirasakan terganggu oleh pihak lain, maka kesetiakawanan itu menjadi lebih menebal. Hal seperti inilah yang ternyata mengawali tragedi Ambon.

Dari segi lain, keberhasilan rata-rata pendatang baru BBM dan komunitas Ambon beragama Islam dalam berbagai sektor, sebagai pelaku ekonomi dan aparat pemerintahan, telah meningkatkan pencapaian ekonomi mereka. Taraf pencapaian ekonomi mereka lebih tinggi daripada pencapaian ekonomi yang diperoleh

rata-rata komunitas Ambon beragama Kristen, terutama kaum petaninya. Keberhasilan itu dianggap oleh masyarakat Ambon tidak semata-mata merupakan hasil dari kerja keras, tetapi juga dari praktek-praktek KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), dan dari jaringan hubungan 'kemitraan' dengan Pemerintah Pusat. Aparatur pemerintahan di Ambon dipandang sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat.

Dalam kondisi seperti itu, kesenjangan sosial ekonomi tidak terhindarkan. Kecemburuan sosial, kebencian dan permusuhan merebak di mana-mana, khususnya terhadap anggota kelompok etnis BBM yang dianggap telah menguras kekayaan Maluku dan menambah penderitaan kelompok etnis Ambon. Bagi mereka hanya ada satu dari dua pilihan: ke luar dari Ambon atau mati, tidak peduli apakah mereka lahir dan dibesarkan di situ atau telah diterima sebagai *pela*.

Hancurnya sistem nilai budaya *pela* pada saat kerusuhan berlangsung, dapat dianalogikan dengan suasana ketidakpastian hukum, ketidaktegasan aparat penegak hukum dan petugas keamanan, serta ketidaknetralan mereka dalam menangani kerusuhan. Keadaan seperti itu menimbulkan ketidakpercayaan, baik terhadap pranata adat maupun pranata pemerintahan dan birokrasi. Selain itu, ketidakpastian tersebut menimbulkan pula rasa ketidakadilan, baik di kalangan anggota kelompok etnis BBM maupun di antara orang-orang Ambon, yang beragama Islam maupun Kristen.

Keadaan seperti itu diperburuk lagi dengan tingkah polah sejumlah aparat keamanan dan pemerintahan di kota itu yang ber-KKN dan menjadi pelindung (*backing*) bagi konglomerat dan pengusaha, maupun bagi para preman dan pelaku kriminal. Keadaan itu menimbulkan rasa ketidakpuasan, kecemasan dan ketidakamanan, dan lebih jauh lagi mendorong timbulnya

perbuatan main hakim sendiri sebagai wujud dari ketidakpercayaan mereka terhadap hukum.

## Solusi pemecahan konflik tragedi Ambon

### Jangka pendek

- Melaksanakan dan melanjutkan pelaksanaan upacara adat *Pela Gandong* pada hari-hari besar nasional dengan memasukkan atau menyelipkan upacara tersebut di dalam acara pokok. Dalam teknis pelaksanaan upacara *Pela Gandong*, anggota kelompok etnis Ambon yang beragama Islam dan Kristen hendaknya dilibatkan secara seimbang dan adil. Kalau pelibatan mereka dirasakan tidak seimbang, sebaiknya petugas atau pelaksana dari upacara tersebut diambil dari mereka yang beragama lain—di luar Muslim dan Pemeluk Protestan—seperti mereka yang beragama Hindu, Budha atau Khatolik (yang dinilai *netral*);
- para pengungsi atau mereka yang dari kalangan kelas bawah yang tidak memiliki rumah dan harta benda lagi akibat dari terbakar atau hancur akibat kerusuhan, hendaknya diusahakan ganti rugi dengan standar harga pengganti sesuai dengan kemampuan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) hendaknya dapat digunakan juga untuk membantu mengurangi kehancuran ekonomi para pengungsi dan penderitaan mereka selama kerusuhan berlangsung, maupun selama masa pemulihan akibat kerusuhan;
- perlunya penegasan netralitas petugas keamanan (polisi) dan TNI dalam menangani kerusuhan Ambon.

### Jangka menengah

- Perlu pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang bertikai dalam kerusuhan Ambon, khususnya bagi anggota kelompok etnis Ambon, baik yang beragama Islam maupun Kristen;
  - perlunya pemberdayaan anggota/petugas keamanan dalam kesatuan Kepolisian Negara dalam penanganan kasus Ambon sehingga penanganan kerusuhan tetap berada dalam kondisi dan garis keamanan sipil, dan bukan dengan kondisi DOM selayaknya situasi perang. Kondisi dalam kondisi keamanan sipil diharapkan lebih bersifat pencegahan (*preventif*), perdamaian (*reconciliation*) dan akomodasi tanpa mementingkan atau berpihak dan menyalahkan salah satu pihak, melukai harga diri pihak lain, serta tanpa menekankan pada tindakan represif;
  - perlunya ketegasan dari para petugas keamanan dalam menangani kerusuhan Ambon tanpa membedakan kelompok etnis, tingkat sosial ekonomi dan agama yang dianut. Selain itu, hukum dan peraturan perundang-undangan harus segera diberdayakan dan dipertegas daya jangkauan maupun daya berlakunya;
  - para pengungsi dari kelompok BBM yang telah mengungsi ke daerah Sulawesi Selatan dan daerah-daerah lain harus diusahakan sekuat mungkin oleh Pemda untuk dikembalikan ke tempat pemukiman semula di Propinsi Maluku.
- Persyaratan utama bagi pengungsi yang akan dikembalikan:
- mereka yang telah lahir dan dibesarkan di Propinsi Maluku;
  - mereka yang telah bermukim di propinsi ini paling sedikit 25 tahun;

- mereka yang telah melakukan kawin campur atau mengawini penduduk setempat dan telah beranak-pinak;
- mereka yang tidak pernah terlibat dalam premanisme atau kriminalitas selama mereka berada di propinsi ini;
- pihak-pihak yang terlibat atau yang belum terlibat kerusuhan Ambon harus mereformasi dan melakukan introspeksi terhadap diri mereka dalam berbagai aspek baik secara individu maupun secara kelompok;
- perlu didirikan forum komunikasi antar kelompok etnis dan kelompok agama yang melibatkan tokoh/pemuka masyarakat, tokoh agama, pemuda dalam berbagai tingkat pemerintah (daerah tingkat I dan II, kecamatan dan desa/dusun) untuk merealisasikan kegiatan pada dua butir terakhir di atas.

#### Jangka panjang

- Agar petugas keamanan (anggota Polisi) dapat berfungsi secara maksimal dan profesional dalam menangani kerusuhan dan pertikaian di Propinsi Maluku, maka kemampuan kepolisian negara perlu ditingkatkan dan diberdayakan dalam segi kuantitatif maupun kualitatif. Peningkatan dalam segi kuantitatif berkaitan dengan peningkatan dari segi jumlah personil; jumlah peralatan dan fasilitas lainnya, seperti perumahan dinas, kendaraan pribadi, jumlah pos penjaga, pengawas dan pelindung, kenaikan gaji yang memadai (berkisar antara Rp. 1.500.000,00 sampai Rp. 7.500.000,00 per bulan), dan lain sebagainya. Perbaikan dalam segi kualitas berkenaan dengan disiplin, komitmen, tanggung jawab, kepekaan, keterampilan, ketidakberpihakan, keberanian dan lain sebagainya. Dengan

demikian, setiap kasus kerusuhan kriminalitas dan premanisme yang mengganggu ketentraman rakyat kecil dapat diselesaikan secara tuntas dan cepat;

- pembinaan umat agama oleh pemimpin/pemuka agama masing-masing perlu ditingkatkan secara terus menerus agar mereka tidak hanya memiliki hubungan vertikal (*hablumninallah*), tetapi juga hubungan horisontal (*hablumminanas*) yang tinggi;
- otonomi daerah atas Propinsi Maluku perlu lebih ditingkatkan dan diperluas. Untuk itu propinsi ini perlu dimekarkan paling sedikit menjadi dua (2) propinsi: Propinsi Maluku Utara dan Propinsi Maluku Selatan;
- Pemerintah Pusat hendaknya mengurangi kebijakan yang sentralistik dengan prinsip *top-down policy*. Campur tangan pusat dan monopoli atas perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi lain, apalagi yang dilakukan secara individu melalui hubungan KKN antara oknum 'orang' pusat dengan 'orang' daerah, sudah seharusnya dihapuskan. Dengan demikian, kesan hubungan bisnis semacam itu, yang menguntungkan salah satu kelompok masyarakat di propinsi ini dapat dihilangkan.

#### Konflik dan tragedi Sambas dan solusi pemecahannya

##### Konflik dan tragedi Sambas

Tidak seorang pun akan mempercayai bahwa kelompok etnis Melayu terlibat konflik berdarah dengan kelompok etnis lain, khususnya Madura. Selama 11 kali konflik etnis yang pernah berlangsung di Kalimantan Barat sejak 1962 sampai 1999 (Kapolres Sambas 1999;

Alqadrie 1999b), hanya terjadi satu kali konflik tahun 1999 yang melibatkan komunitas Madura dengan Melayu. Sepuluh konflik lainnya terjadi antara komunitas Dayak dengan Tionghoa sebanyak satu (1) kali pada tahun 1967, dan antara Madura dengan Dayak sebanyak sembilan (9) kali konflik yang terjadi pada tahun 1962, 1963, 1968, 1972, 1977, 1979, 1983, 1996/1997 dan 1999 (ketika mereka bergabung dengan Melayu Sambas menghadapi Madura Sambas).

Dari jumlah konflik yang terlibat, kita dapat menyatakan bahwa kelompok etnis Melayu pada umumnya, dan di Kalimantan Barat pada khususnya jauh lebih sabar dan tidak menyukai konflik ketimbang anggota kelompok etnis lainnya. Selama sepuluh (10) kali konflik yang melibatkan tiga komunitas etnis di atas, Melayu selalu netral.

Komposisi penduduk Kalimantan Barat menurut kelompok etnis tahun 1997 menunjukkan: Melayu berjumlah sekitar 47% (termasuk persentase komunitas Dayak dan lainnya yang telah masuk Islam dan menyatakan sebagai Melayu), menyusul berturut-turut kelompok etnis Dayak 31%, Tionghoa 12%, Jawa 3%, Madura 3%, Bugis 2%, Sunda 1% dan sisanya 2% meliputi kelompok etnis lainnya (BAPPEDA Kalimantan Barat 1998).<sup>3</sup>

Berdasarkan data di atas, penduduk Madura Kalimantan Barat berjumlah sekitar 120.000 jiwa, sedangkan penduduk Madura Sambas mencapai sekitar 80.000 atau 2/3 pada

1996, dan sekitar 90.000 atau 2/3 pada 1998 yang terkonsentrasi di Kabupaten Sambas. Pada tahun 1996 terdapat hanya sekitar 40.000 atau 1/3 dan 30.000 atau 1/4 dari jumlah pada tahun 1998 dari jumlah Madura Sambas yang tersebar di seluruh daerah di Kalimantan Barat.

Sejak sembilan (9) kali konflik, sebagian penduduk pendatang Madura mulai menyebar hanya ke tiga daerah dari tujuh (7) kabupaten di Kalimantan Barat, Sambas, Ketapang dan Kotamadya Pontianak. Setelah konflik dua tahun yang lalu, penduduk Madura dari empat (4) kabupaten lainnya, khususnya Sanggau dan Sintang, diperkirakan telah pindah ke Kabupaten Sambas. Bahkan, sebagian besar dari Madura Sambas yang telah lama berdomisili di tujuh (7) dari 19 kecamatan di Kabupaten Sambas yang dihuni oleh mayoritas kelompok etnis Dayak, diperkirakan telah mengungsi ke wilayah-wilayah dekat pesisir dan ke daerah-daerah kecamatan yang dihuni oleh mayoritas Melayu.

Data di atas menunjukkan bahwa salah satu penyebab konflik antara Melayu dengan Madura Sambas adalah faktor demografi, yaitu tekanan penduduk di Kabupaten Sambas pada umumnya, dan tekanan jumlah penduduk pendatang Madura terhadap kawasan pemukiman Melayu di daerah itu. Informasi tersebut juga menjelaskan bahwa faktor kesempatan kerja (*job opportunity*) dan lapangan kerja (*field of work*) yang berkaitan secara timbal balik dengan hak-hak kepemilikan (*ownership*), juga bertanggung jawab bagi timbulnya pertikaian tersebut, dan bukan faktor kesenjangan sosial ekonomi sebagaimana terjadi pada tragedi Ambon.

Kesempatan kerja dan hak-hak kepemilikan secara perlahan-lahan tapi pasti berpindah tangan dari Melayu Sambas ke pendatang Madura. Hal ini akan mempersempit lapangan kerja bagi mereka yang tersebut pertama. Dalam satu kompetisi ekonomi yang seimbang dan

<sup>3</sup> Bandingkan data baru BAPPEDA ini dengan sumber data lain tahun 1992 (Akil 1994:186) yang mencatat kelompok etnis Melayu 39,57% (persentase ini tidak termasuk muallaf dari anggota kelompok etnis Dayak maupun lainnya yang telah menyatakan 'masuk' Melayu), dan Dayak 41%. Presentase penduduk Kabupaten Sambas adalah: Melayu 47%, Dayak 28%, Cina 11%, Madura 9,4% dan sisanya, kelompok etnis lainnya 4,6%, dari jumlah sekitar 791.937 jiwa tahun 1996 (Pemda Kabupaten Dati II Sambas 1998) dan hampir mencapai 900.000 jiwa tahun 1998 (Polres Sambas 1999; Kantor Sensus dan Statistik, Kabupaten Sambas 1999).

berjalan dalam kondisi kepastian hukum, hilangnya kesempatan kerja dan hak kepemilikan, lalu berpindah tangan pada pihak lain, merupakan fenomena sosial-ekonomi biasa. Namun, pada kenyataannya gambaran di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hilang dan berpindahnya kesempatan dan lapangan kerja dalam waktu kurang dari sepuluh tahun mula-mula dilakukan dengan cara yang wajar. Misalnya, memberikan setoran lebih tinggi atas alat-alat transportasi yang mereka gunakan pada pemilik, dibanding dengan setoran yang mampu dibayarkan oleh komunitas Melayu dan lainnya; atau menurunkan tarif yang harus dibayar oleh langganan lebih rendah daripada tarif yang telah ditetapkan secara umum. Namun, setelah alat-alat transportasi, pertanian dan alat-alat kerja lainnya dimiliki oleh Madura Sambas, maka mereka segera menurunkan kembali jumlah setoran di bawah setoran semula, atau sebaliknya, menaikkan kembali tarif untuk langganan. Tindakan tersebut, yang justru akan memperkuat dominasi mereka, sering dilakukan dengan kekerasan dan intimidasi.

Dalam hak-hak kepemilikan, sebelum terjadi pemindahan hak, anggota kelompok etnis Melayu dan etnis lainnya menggunakan orang-orang Madura Sambas sebagai mitra kerja dengan perjanjian bagi hasil untuk mengerjakan, memelihara, menunggu dan mengelola lahan pertanian, perkebunan atau peternakan sapi yang tidak dapat mereka kerjakan sendiri. Pada mulanya, kemitraan itu berjalan baik, tetapi lama kelamaan hak kepemilikan atas sektor atau lapangan usaha tersebut satu persatu jatuh ke tangan pengelola orang-orang Madura. Hal itu terjadi tidak saja karena persyaratan bagi hasil itu cenderung terus meningkat dengan perbandingan yang terus menguntungkan pihak pemelihara, orang-orang Madura Sambas, tetapi juga karena mereka selalu berkeinginan membeli alat-alat

produksi tersebut dengan harga yang sangat murah. Orang-orang Madura Sambas akan meninggalkan alat produksi yang dimitrakan itu, sekalipun pemiliknya ingin mengelolanya sendiri walaupun dengan biaya lebih rendah.

Proses berpindahnya atau pengambilalihan kesempatan atau lapangan kerja dan hak-hak kepemilikan itu dinilai oleh pihak Melayu Sambas dan kelompok etnis lainnya sebagai hal yang tidak wajar, sering dengan cara-cara tidak jujur dan intimidasi. Misalnya, dengan melepaskan ternak mereka di atas lahan pertanian/perkebunan, atau memindahkan batas tanah dengan cara-cara yang tidak wajar. Bila mereka bertetangga dengan penduduk setempat, mereka mengambil berulang kali hasil-hasil yang terdapat di atas lahan tersebut tanpa pemberitahuan. Apabila tindakan yang dilakukan pada siang hari itu diketahui oleh pemilik, mereka menjawab dengan seenaknya:

'tidak mencuri pak/bu, kalau mencuri dilakukan pada malam hari baru disebut mencuri,'

atau

'sudah minta ijin, pak/bu, jadi saya berani mengambil.'

Sering mereka memberitahu/meminta hanya sekali saja dan tidak memerlukan izin lagi untuk mengambil barang yang diinginkan. Ada ungkapan yang terkenal di kalangan rakyat Kalimantan Barat untuk memperjelas hal di atas:

'sewaktu ternak masih kecil atau padi atau buah-buah masih muda adalah milik kita' (Melayu, Dayak dan kelompok etnis lainnya), 'tetapi setelah ternak atau hasil tanaman itu telah besar atau masak, mereka menjadi milik orang.'

Mengambil milik orang lain tanpa ijin bukanlah mencuri kalau tindakan itu diketahui pemiliknya pada siang hari, dan lain sebagainya.

Akumulasi dari perasaan kecewa, benci, sakit hati, terhina dan sebagainya yang dirasakan oleh orang Melayu dan anggota

kelompok etnis lainnya di Kabupaten Sambas, merupakan perwujudan dari pengalaman pahit mereka hidup berdekatan dengan komunitas Madura Sambas yang tidak bertanggung jawab. Hal itu dialami dalam jangka waktu yang cukup panjang dalam bentuk premanisme dan kriminalitas lainnya.

Dalam kasus Ambon, kebanyakan premanisme hanya terjadi di kota-kota besar, khususnya kota Ambon. Berdasarkan catatan Kapolres Sambas (1990) dan hasil wawancara dengan informan kunci, kriminalitas di kalangan oknum-oknum Madura Kalimantan Barat terjadi juga di kota-kota kecil, seperti kecamatan dan pedesaan yang ada hampir di seluruh di Kabupaten Sambas. Sasaran aksi mereka pada umumnya adalah pengusaha atau pedagang dari komunitas Tionghoa, Melayu dan anggota kelompok etnis lainnya. Dalam melakukan aksi, seringkali beberapa preman—atau ada juga yang disebut mafia—pada beberapa desa di Kecamatan Tebas, tidak memilih berdasarkan kondisi sosial ekonomi calon korban.

Aksi mereka itu berbentuk pencurian, perampokan, pemerasan, penjudian diimbangi dengan minum-minum miras sampai mabuk, mengganggu anak gadis atau bahkan memperkosa—seperti terjadi di kecamatan Jawai—pembunuhan, pencegahan sepeda motor secara terang-terangan, menabrak pejalan kaki (orang Melayu dan Tionghoa) dan ternak, untuk kemudian minta ganti uang karena sepeda motor dan penabraknya jatuh, perkelahian atau penyerangan secara massal, dan lain sebagainya. Dalam aksi pemalakan, ada juga di antara mereka yang menentukan target penghasilan minimum sebesar Rp. 350.000,00 per hari. Kurang dari itu, mereka akan merusak toko-toko dan rumah-rumah yang mereka lalui (Alqadrie 1999b:15-17). Untuk menghilangkan jejak, sebagian besar preman dan kriminal itu mengintimidasi korban untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas keamanan.

Sejarah premanisme, kriminalitas dan kekerasan lainnya di berbagai kecamatan di kabupaten ini, khususnya kawasan yang jauh dari Singkawang, Ibu Kota Kabupaten Sambas, sebagaimana ditemukan oleh Tim Peneliti Kapolri (1999), cukup panjang. Di daerah-daerah pedesaan, Kecamatan Pemangkat, aksi yang meresahkan dan merendahkan martabat penduduk setempat itu telah berjalan lebih dari 40 tahun. Di Kecamatan Tebas aksi premanisme dan kriminalitas telah berlangsung kurang lebih 50 tahun; di Kecamatan Sambas 80 tahun; di Kecamatan Sejangkung, Teluk Keramat dan Paloh, lebih dari 30 tahun, dan kecamatan lainnya yang mengarah lebih ke pedalaman yang dihuni oleh campuran komunitas Melayu dan Dayak atau oleh mayoritas Dayak Kabupaten Sambas, telah berlangsung lebih dari 35 tahun. Akibatnya, anggota kelompok etnis pendatang Madura yang tidak berdosa terusir beberapa kali dari kawasan tersebut. Di Kecamatan Jawai (Camat Jawai 1999), aksi yang menyengsarakan penduduk setempat telah berjalan sejak 50 tahun. Kronologis waktu terjadinya kriminalitas dari sekelompok Madura Sambas terhadap penduduk setempat sempat tercatat sebanyak 31 kali dimulai tahun 1950-an.

Peristiwa Dusun Parit Setia, Kecamatan Jawai, yang merupakan salah satu pemicu timbulnya tragedi Sambas, merupakan bukti suburnya premanisme dan kriminalitas dari beberapa oknum Madura Sambas terhadap orang-orang Melayu, Tionghoa dan kelompok etnis lainnya. Pada hari raya Idul Fitri 19 Januari 1999, hari yang dimuliakan oleh umat Islam di seluruh dunia, lebih dari 200 orang Madura Sambas, gabungan dari Kecamatan Tebas dan Jawai, menyerang. Mereka membunuh tiga orang dan melukai dua orang Melayu lainnya, hanya untuk membela seorang kriminal yang diketahui mencuri dan dipukuli oleh tiga orang Melayu di dusun itu. Penyerangan brutal itu telah memicu kemarahan penduduk

setempat—Melayu dan Dayak—dan mendapat simpati dan dukungan dari anggota kelompok etnis lainnya.

Kesabaran orang-orang Melayu Sambas cukup panjang. Walaupun telah jatuh korban jiwa, luka parah dan terhina dengan yel-yel yang diteriakkan oleh para penyerang pada Idul Fitri itu, 'Hidup Madura, 3 - 0, Melayu krupuk,' namun mereka masih bersedia melaksanakan perdamaian yang berjalan sekitar satu bulan, dan menahan emosi agar kemarahan individu dan keluarga tidak terangkat menjadi kemarahan kolektif dan amuk massa. Namun, premanisme dan kriminalitas terus berlanjut sampai seorang kernet Melayu Tebas luka parah dan seorang pekerja Dayak dicegat dalam perjalanan dan dibunuh. Reaksi berlebihan dari kelompok etnis Melayu yang didukung sepenuhnya oleh Dayak Sambas terhadap Madura Sambas tidak dapat dihindari, dan terjadilah tragedi Sambas.

Kemarahan, kepedihan, keterhinaan dan kebencian itu masih dibakar lagi oleh struktur ketidakadilan yang masih dialami oleh penduduk setempat di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas selama lebih dari tiga dekade dalam Pemerintahan Orde Baru. Ketidakadilan itu terbentuk karena ketidakpedulian dan kurangnya komitmen dari petugas keamanan dan Pemda terhadap penderitaan penduduk setempat dalam hidup berdampingan dengan saudaranya, pendatang Madura. Selain itu, petugas keamanan tidak mampu dan tidak tegas dalam menangani kasus-kasus kriminalitas yang telah berjalan selama puluhan tahun.

Ketidakadilan struktural itu menjalar hingga sampai pada eksploitasi SDA yang berlebihan melalui perusahaan HPH. Terjadi penghancuran hutan dan pengambilan tanah-tanah adat dengan dalih pendirian perkebunan dan proyek pembangunan lainnya, pembukaan lapangan kerja dalam bentuk perbankan, perusahaan industri, proyek perkebunan, dan lain

sebagainya yang hanya diisi dengan tenaga kerja dari kelompok etnis tertentu atau dari keluarga 'penggede' dari luar Kalimantan Barat. Selain itu, terjadi pencurian kayu dan penebangan liar yang diorganisir oleh perusahaan milik instansi resmi atau pejabat dan penguasa dari Jakarta; dan keterlibatan terang-terangan pemerintah Orde Baru melalui jaringan birokrasi terhadap monopoli berbagai hasil dan SDA di daerah ini.

Keterlibatan Pemerintah Orde Baru terhadap monopoli rempah-rempah, khususnya cengkeh, merupakan salah satu akar masalah tragedi Ambon. Keterlibatan Pemerintah Orde Baru dalam monopoli jeruk Kabupaten Sambas, yang merupakan primadona ekspor daerah ini bukan saja telah mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan devisa daerah Kalimantan Barat dan Sambas, melainkan juga telah merusak sendi-sendi perekonomian rakyat setempat dan menghancurkan tatanan masyarakat yang sudah berjalan baik. Kehancuran dalam segi ini juga merupakan salah satu akar masalah timbulnya tragedi Sambas.

Tragedi Sambas bukanlah hasil dari konflik antara kelompok etnis Madura dengan Melayu secara keseluruhan, melainkan konflik itu lebih terbatas antara pendatang baru Madura dengan Melayu Sambas saja. Perbedaan antara pendatang baru dengan pendatang lama Madura (kedua komunitas ini juga biasa disebut dengan Madura Sambas), khususnya dalam karakter atau sifat, kepribadian dan perilaku, disebabkan tidak hanya oleh lamanya mereka berada di Kalimantan Barat, khususnya di kabupaten ini,<sup>4</sup> tetapi juga oleh faktor sosial budaya, geografis, demografis, dan ekonomi yang mereka alami dengan intensitas yang berbeda. Pendatang lama Madura lebih ramah,

<sup>4</sup> Pendatang baru telah berada di sini paling lama 25 tahun, sedangkan pendatang lama telah berada di daerah ini lebih dari 26 tahun

bisa berbaur, kurang eksklusif dan kurang cenderung memaksakan kehendak dibanding pendatang baru.

Orang-orang Madura memiliki sistem nilai budaya yang mementingkan harga diri (*self esteem*) yang dikenal dengan *acarok*, *todus* dan *taretan* (Alqadrie 1987, 1991). Unsur budaya bawaan semacam ini dilengkapi lagi dengan faktor geografis dan faktor demografis yang kurang menguntungkan, seperti antara lain lahan yang tidak subur, iklim dan suhu yang lebih panas dan kering, terbatasnya lahan, dan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hal itu diperburuk dengan rendahnya tingkat pendidikan, baik pada saat mereka masih berada di tempat asal, maupun ketika mereka telah pindah ke kabupaten ini. Sistem ekonomi Orde Baru selama tiga dekade yang lebih berorientasi pada konglomerasi dan usaha besar telah meminggirkan orang-orang Madura tingkat bawah calon perantau ini. Kondisi itu menimbulkan tekad untuk segera memperbaiki kehidupan ekonomi mereka di tempat baru.

Kombinasi dari faktor latar belakang di atas ternyata telah membentuk karakter dan kepribadian imigran yang sangat positif bagi pencapaian ekonomi, seperti antara lain berani, kuat secara fisik, kerja keras, ulet, percaya diri, sederhana, hemat, tidak memilih jenis pekerjaan, bersedia diupah rendah, dan patuh pada pimpinan tradisional dan agama (Alqadrie 1987). Faktor latar belakang tersebut membentuk juga karakter 'miring' dan berbagai perilaku negatif lainnya, seperti antara lain keras kepala (*stubborn*), mau menang sendiri, cenderung memaksakan kehendak, sombong (*arogan*), menyelesaikan masalah dengan kekerasan, membangga-banggakan tradisi dan budaya sendiri, kurang tertarik pada tradisi dan adat istiadat setempat, dan berkepribadian kurang seimbang serta gugup (*nervous*).

Dengan melihat karakter di atas, dapat dipahami bila pendatang baru Madura lebih

keras, lebih cenderung memaksakan kehendak secara fisik, dan kurang menghargai tradisi dan adat istiadat penduduk setempat. Hal ini dikemukakan hampir seluruh responden: Melayu, Dayak dan dari kelompok etnis lain. Bahkan, responden dari komunitas pendatang baru Madura menyatakan bahwa mereka cenderung tidak mematuhi prinsip budaya: 'Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.' Jadi, akar masalah dari tragedi Sambas juga dapat berasal dari faktor budaya, walaupun ia tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan faktor non-budaya seperti tersebut di atas.

Saya melihat bahwa faktor perbedaan budaya, sama halnya dengan tragedi Ambon (yang muncul dalam perbedaan agama-Islam dan Kristen), memang berpengaruh terhadap keras, luasnya intensitas konflik, dan lamanya konflik berakhir. Namun, hal itu hanya sebatas sebagai faktor pemicu, atau kulit pembungkus rapi bagi akar masalah sebenarnya, yaitu:

- struktur ketidakadilan, termasuk di dalamnya kurang berfungsinya aparat keamanan dan jaringan monopoli terhadap hasil primadona daerah ini;
- kompetisi ekonomi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, hilang dan berpindahnya kesempatan kerja dan hak pemilikan dan;
- premanisme, tindakan kriminalitas.

Faktor perbedaan budaya, yang menjadi akar masalah keempat, sebagai pemicu dan pembungkus konflik secara rapi, antara lain:

- kebiasaan membawa senjata tajam di tempat-tempat umum dan sangat mudah menggunakannya dalam pemecahan masalah;
- pendirian tempat ibadah dan melaksanakan ibadah secara eksklusif;
- pelaksanaan pernikahan secara eksklusif;

- pertunjukan *ronggeng* di kalangan komunitas Madura Sambas dengan perjudian dan minum-minuman keras;
- tidak mengakui hukum adat setempat yang berbau non-Islam.

Pengamatan mendalam menunjukkan bahwa konflik etnis di Sambas bersifat unik dan berbeda jauh dari konflik-konflik sebelumnya. Keunikan konflik ini terletak pada fakta bahwa ia terbatas atau terkonsentrasi dalam segi jangkauan wilayah (*geographical reach*), keterlibatan individu (*individual involvement*) dan intensitas konflik (*conflict intensity*).

Konsentrasi dalam jangkauan geografis memperlihatkan bahwa walaupun konflik telah berlangsung tiga bulan, jangkauannya masih terbatas dalam lingkungan Kabupaten Sambas dan tidak meluas ke wilayah kabupaten lain. Ketika pertikaian itu baru berlangsung satu bulan saya berhipotesis: pertikaian itu hanya berlangsung dalam lingkungan Kabupaten Sambas. Paling jauh ia hanya akan sampai pada Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, dan tidak akan melampaui Jembatan Sungai Duri (batas antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Pontianak). Dengan demikian, konflik itu tidak akan meluas ke kawasan Kabupaten Pontianak, Sanggau maupun Kodya Pontianak, walaupun komunitas Melayu dan Madura Kalimantan Barat terkonsentrasi dalam wilayah ketiga Dati II ini. Konflik ini juga tidak akan meluas ke kabupaten lainnya. Pada konflik etnis dua tahun sebelumnya (1996/1997)—antara komunitas Madura dengan Dayak Kalimantan Barat—konflik meluas paling tidak ke empat kabupaten yaitu: Sambas, Pontianak, Sanggau dan Kodya Pontianak.

Keterlibatan individu dalam pertikaian itu juga terbatas. Pada konflik dua tahun yang lalu, di mana pun dan kapan pun para anggota dari dua kelompok etnis ini bertemu, konflik fisik dan bunuh-membunuh antara mereka cenderung

terjadi. Intensitas konflik tidak terlalu keras dan mencekam dibanding dengan konflik sebelumnya. Ini dapat dilihat bahwa kondisi mencekam seperti itu tidak terjadi pada konflik kali ini. Tidak juga tampak permusuhan dan dendam antara komunitas Madura dengan komunitas Melayu di luar kawasan Kabupaten Sambas.

Mengapa ruang lingkup konflik etnis kali ini terbatas sedemikian rupa? Hal ini disebabkan oleh pertama, anggota kedua kelompok etnis ini menganut agama yang sama yaitu Islam. Bahkan, Islam menjadi identitas etnis utama mereka. Kedua, walaupun kesetiakawanan sosial kelompok etnis Melayu Kalimantan Barat juga tinggi, sebagaimana dimiliki oleh kelompok etnis Dayak dan Madura Kalimantan Barat, mereka tidak mudah terpancing oleh konflik yang terjadi di sekitar lingkungan geografis mereka. Konflik itu tidak mudah pula mengangkat kemarahan individu menjadi kemarahan kolektif, kecuali bila sudah di luar batas kesabaran. Lagipula, tokoh masyarakat Melayu jarang mau menggerakkan masyarakatnya untuk kepentingan politik sempit.

Terbatasnya ruang lingkup konflik kali ini menimbulkan optimisme bahwa *cooling down* akan segera tercapai. Konflik ini diharapkan dapat segera berakhir, sehingga proses damai menyeluruh mungkin dapat segera digulirkan, dan solusi akhir dapat dipersiapkan.

### **Solusi pemecahan pertikaian etnis di Sambas danantisipasi konflik mendatang.**

Ada tiga tahap solusi pemecahan pertikaian etnis di Sambas, yaitu Solusi Jangka Pendek, Solusi Jangka Menengah, dan Solusi Jangka Panjang.

#### **Solusi jangka pendek**

Solusi ini meliputi tiga hal, yaitu :

- untuk mencegah korban jatuh lebih banyak lagi, seluruh pengungsi di Kabupaten Sambas, termasuk yang masih ditempatkan di Lokasi Pendidikan Tamtama Pasir Panjang, Singkawang, secepatnya dipindahkan ke Pontianak. Ini persyaratan bagi terjadinya *cooling down* dan proses damai;
- keamanan para pengungsi hendaknya diperketat dan dilindungi dari ancaman pihak mana pun. Kebutuhan mereka sehari-hari hendaknya dijamin dan dilayani, termasuk sanitasi, MCK dan kesehatan medis dan psikologis. Tanpa memperhatikan pelayanan terhadap mereka, dikhawatirkan provokator akan masuk;
- relokasi bagi para pengungsi hendaknya segera dipersiapkan, baik dalam penetapan lokasi yang sesuai, maupun persyaratan lainnya bagi relokasi terpadu.

#### Solusi jangka menengah

Solusi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- tokoh masyarakat dari kedua kelompok etnis ini dari tingkat paling bawah (*grass root*), kecamatan, kabupaten sampai propinsi perlu membicarakan relokasi atau transmigrasi lokal. Pemda Kalimantan Barat perlu didorong untuk tidak memulangkan pengungsi ke tanah asalnya atau ke propinsi lain, kecuali atas keinginan atau keikhlasan mereka. Itu pun harus dilakukan dengan pesangon secukupnya. Mereka yang tidak tergolong ke dalam pilihan di atas, didorong untuk mengikuti relokasi yang telah ditetapkan oleh Pemda Kalimantan Barat. Relokasi hendaknya dilaksanakan secara terpadu dengan menjadikan lokasi itu sebagai proyek transmigrasi lokal dengan mengikutsertakan penduduk

setempat. Perlu dibicarakan persyaratan yang lebih terinci bagi mereka yang ingin kembali ke daerah Sambas;

- setelah semua pengungsi dipindahkan ke Pontianak dan *cooling down* tercapai, tokoh masyarakat yang moderat dari kedua belah pihak bertemu lagi untuk membicarakan proses damai. Dapat dibuat semacam persyaratan tentang siapa dan bagaimana mereka yang diijinkan kembali ke daerah kabupaten ini. Misalnya, mereka yang orang tuanya dilahirkan di kabupaten ini, mereka dan yang orang tuanya telah kawin campur dengan penduduk setempat, dan mereka yang tidak pernah terlibat dalam kriminalitas, premanisme dan tindakan negatif lainnya. Persyaratan lain berisi ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan hak-hak mereka yang harus dipatuhi setelah mereka diterima, dan apa sanksinya bila ketentuan itu dilanggar;
- perlu dicarikan faktor penyeimbang terhadap sistem nilai budaya *acarok*, *todus* dan *taretan* yang tidak terdapat dalam diri mereka, yaitu ulama atau kyai yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang tinggi dalam bidang hubungan sosial kemasyarakatan, serta Habib yang dianggap sebagai keturunan Nabi. Mereka ini disebut tokoh *Hablumminannas* dan mampu 'menjinakkan' kekerasan dalam diri orang-orang Madura Kalimantan Barat. Selama ini, tokoh seperti itu tidak ada dan tidak berfungsi di daerah Kabupaten Sambas;
- penegakan hukum perlu dilaksanakan segera secara konsisten dan konsekuen. Kemampuan personil petugas keamanan perlu ditingkatkan dalam segi kuantitas—peralatan dan

- jaminan sosial—maupun kualitas: mentalitas, moralitas dan komitmen;
- perlu dibentuk Forum Kerukunan Anggota Kelompok Etnis;
  - untuk mengantisipasi konflik etnis yang lebih luas antara kelompok etnis Dayak dengan Melayu Kalimantan Barat, otonomi daerah perlu lebih diperluas melalui antara lain pemekaran wilayah Dati II dari tujuh buah Dati II menjadi 15 Dati II. Pemekaran itu memungkinkan anggota kedua kelompok etnis itu dapat duduk menjadi pimpinan Dati II secara lebih merata;
  - segala bentuk jaringan monopoli dan struktur ketidakadilan yang masih membelenggu rakyat Kalimantan Barat perlu dihilangkan;
  - perlu adanya introspeksi dan reformasi total di kalangan orang-orang Madura secara interen (ke dalam) pada tingkat bawah di Kalimantan Barat. Peranan pimpinan informal pada dua kelompok etnis tersebut—Madura dan Melayu—perlu ditingkatkan sampai pada tingkat terbawah agar dapat menjembatani hubungan yang kurang serasi di antara mereka.

#### Solusi jangka panjang

Solusi ini mencakup dua hal, yaitu:

- perlu adanya Pusat Informasi dan Manajemen yang mencatat data dan informasi secara lengkap dan akurat tentang keberadaan pendatang Madura dari Pulau Madura. Data dan informasi ini sangat perlu dalam mengajari mereka untuk mengantisipasi konflik lebih lanjut;

- perlu adanya perluasan otonomi daerah yang nyata dalam bentuk penetapan kembali secara konsekuen perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan proporsi 25:75.

#### Kesimpulan

Pertikaian etnis antara kelompok etnis BBM dengan Ambon, khususnya Kristen di Ambon, dan antara komunitas Madura dengan Melayu Sambas di Kabupaten Sambas, merupakan reaksi yang berlebihan terhadap komunitas BBM dan Madura Sambas yang timbul dari akumulasi kemarahan, kebencian, keterhimpitan, ketidakberdayaan, keterhinaan dan ketersingkirkan anggota komunitas Ambon di Ambon, dan kelompok etnis Melayu di Sambas yang telah mereka alami selama bertahun-tahun.

Reaksi spontan ini adalah wujud konkrit dari kesadaran etnis yang ditimbulkan tidak hanya dari dorongan unsur primordialisme, perbedaan-perbedaan budaya dan kesombongan budaya, tetapi juga dari struktur ketidakadilan ekonomi, politik (khususnya kasus Ambon), dan dalam perlakuan petugas keamanan serta keterpurukan dan keterpinggiran ekonomi anggota kelompok etnis setempat dari kelompok etnis pendatang.

## Kepustakaan

Akil, M.

- 1994 'Fenomena Etnisitas di Kalimantan Barat', dalam Paulus Florus, Stepanus Juweng dkk. (peny.) *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*. Jakarta: Grasindo - Gramedia.

Alqadrie, S. I.

- 1987 *Cultural Differences and Social Life Among Three Ethnic Groups in West Kalimantan*. Tesis Master (M.Sc.). Lexington, KY.: Department of Rural Sociology, University of Kentucky.
- 1988 *Ethnicity, Religion dan Social Change: Ethnic Movement and Nationalism in The West and Third World*. Makalah seminar yang dibacakan di The Sociological Community Kentucky. Lexington, Kentucky: Department of Sociology, University of Kentucky.
- 1991 *Perantau Madura dan Sistem Pertanian Mereka di Kecamatan Sungai Kakap dan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat*. Pontianak: Lembaga Penelitian UNTAN.
- 1992a *Dampak Kehadiran dan Beroperasinya Perusahaan HPH terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Budaya Penduduk Setempat di Daerah Pedalaman Kalimantan Barat*. Hasil Penelitian didanai oleh DP3M, Dirjen Dikti, Dep. Dikbud. Jakarta: DP3M.
- 1992b 'Etnisitas, Religiusitas dan Perubahan Sosial, dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mereka: Gerakan Etnis dan Nasionalisme di Dunia Barat dan Dunia Ketiga', *Proyeksi: Publikasi Ilmiah FISIPOL, UNTAN* 1(III):39-61.
- 1993 *Kemiskinan dan Paradigma Ilmu Sosial: Reorientasi Kebijakan Pembangunan Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kalimantan Barat*. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Tanjungpura, 9 September 1993. Pontianak: Yayasan Penerbitan UNTAN.
- 1997 'Menjalin Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Hubungan Antaretnis: Tinjauan Historis dan Sosiologis Terhadap Dinamika Etnisitas di Kalimantan', dalam *Tantangan Globalisasi: Pendekatan Hankam dan Sospol. Buku III*. Balikpapan - Jakarta: Diterbitkan Untuk Kodam VI Tjpr. oleh Dharmapena Nusantara. Hal. 124-135.
- 1999a *Pendekatan Sosial Budaya Dalam Pembangunan Perkebunan di Kalimantan Barat*. Bahan Ceramah dan Diskusi pada Kursus Pembinaan manajemen Perkebunan. Diselenggarakan oleh CV. Dita Maharani (Indonesia) bekerjasama dengan Incorporated Society of Planter (ISP) (Malaysia), 28 April, 1999. Pontianak: CV. Dita Maharani.
- 1999b *Konflik Madura dan Melayu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat*. Hasil Penelitian Sementara dari anggota Tim Peneliti Kapolri. Pontianak: Polda Kalimantan Barat - Belum diterbitkan.
- 1999c *Kesadaran Etnis, Putera Daerah dan Pemekaran Daerah-Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat*. Bahan Seminar tentang Putera Daerah yang diadakan dalam Rangka Dies Natalis UNTAN ke 40, Pontianak 20 Mei 1999.

Barth, F.

- 1988 *Kelompok-Kelompok Etnis dan Batasannya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Camat Jawai, Kab. Sambas.

- 1999 *Data dan Informasi Mengenai Peristiwa Kriminalitas dan Premanisme di Daerah Kecamatan Jawai Sejak 1950-an*. Tidak diterbitkan. Berupa Laporan Lepas, Tidak Berjud Buku/ Makalah. Jawai: Kantor Kecamatan Jawai, Kab. Sambas.

Deutsch, K.

- 1966 'Social Mobilization and Political Development', *American Political Science Review* 55(3).

- Enloe, C.  
1980 'Ethnicity Diversity: The Potential For Conflict', dalam G. Pauker, F. Golay, dkk. (peny.) *Diversity and Development in Southeast Asia: The Coming Decade*. New York: McGraw-Hill Book Co. Hal. 137-182.
- Gordon, M.  
1964 *Assimilation in American Life*. New York: Oxford University Press.
- Hecter, M.  
1975 *Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536-1966*. Berkeley: University of California Press.  
1985 'Internal Colonialism Revisited', dalam E. Tiryakian dan R. Rogowski (peny.) *New Nationalism of the Developed West: Toward Explanation*. Boston: Allen & Unwin.
- Inkeless, A.  
1964 'Making Men Modern: On the Causes and Consequences of Individual Change in Six Developing Countries', dalam A. Etzioni dan E. Etzioni (peny.) *Social Change*. New York: Basic Book.
- Kantor Sensus dan Statistik, Kabupaten Dati II Sambas  
1999 *Data Monografi Penduduk Kabupaten Dati II Sambas. Data Sementara Dalam Proses Kelengkapan dan Penyelesaiannya*. Singkawang: Kantor Sensus dan Statistik, Kabupaten Sambas.
- Kapolres Sambas  
1990 *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan Kriminalitas, dengan Upaya Mempertebal Daya Tangkal Masyarakat terhadap Gangguan Kamtibmas merupakan Jabaran Strategi Optimasi dan Dinamisasi Tahap Pemantapan (1990-1993)*. Singkawang: Polres Sambas.  
1999 *Kerusuhan Sosial/Antar Etnis Madura dengan Etnis Dayak dan Melayu di Kabupaten Sambas: Data dan Informasi Tentang Kerusuhan antar Etnik di Kalimantan Barat*. Singkawang: Polres Sambas.
- Kluckhohn, F. dan F. Strodtbeck  
1961 *Variant in Value Orientation*. New York: Patterson & Co.
- Koentjaraningrat  
1985 *Kebudayaan dan Mentalitas dalam Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Lokollo, J.E. dkk.  
1977 *Seri Budaya Pela Gandong dari Pulau Ambon*. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
- Narral, R.  
1964 'Ethnic Unit Classification', *Current Anthropology* 5(4).
- Pattikayhatu, J.A., dkk.  
1997 *Sejarah Asal Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri di Pulau Ambon*. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
- Parsons, T.  
1975 'Some Theoretical Considerations on the Nature and the Trends of Change in Ethnicity', dalam N. Glazer dan D. Moynihan (peny.) *Ethnicity: Theory and Experience*. Cambridge: Harvard University Press. Hal. 56-71.

Pemerintah Kabupaten Dati II Sambas

1998 *Rekapitulasi Data Monografi Kecamatan di Kabupaten Dati II Sambas*. Singkawang: Tata Pemerintahan Setwilda Tkt. II Sambas.

Rogers, E.

1962 *Diffusion of Innovations*. New York: The Free Press.

Smith, A.

1985 *The Ethnic Revival*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Suparlan, P., S. Budhisantoso, dkk.

1999 *Kerusuhan Ambon dan Rekomendasi Penanganannya*. Laporan Hasil Penelitian Tim Ahli UI dan PTIK. Jakarta: Polri.

Tim Peneliti Kapolri

1999 *Kerusuhan Sambas dan Rekomendasi Penanganannya*. Laporan Hasil Penelitian Sementara dan Dalam Proses Penyelesaian. Jakarta: Polri, PTIK, UI.

Zeitlin, M.

1970 *Revolutionary Politics and the Cuban Working Class*. New York: Academic Press.

